

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Bela Negara merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia yang memiliki strategi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sudah seharusnya memahami karakter-karakter yang menggambarkan nasionalisme. Untuk itu didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut;

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara memiliki peran penting dalam membangun Sumber Daya Manusia dalam usaha Pertahanan Negara. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 3 yang salah satunya bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270.20 juta jiwa (SP 2020, Bps.go.id), peran Pusdiklat akan sulit terlihat dalam menjalankan Program Nawa Cita atau revolusi mental dengan merata. Semakin bervariasi ancaman dan tantangan terhadap negara ini, kemudian membuat keberadaan Pusdiklat Bela Negarapun menjadi semakin penting, sebagai sebuah investasi jangka panjang terhadap keamanan nasional serta pertahanan negara. Warga negara yang diberikan kemampuan dasar bela negara dalam segi mental dan fisik akan menjadi modal pertahanan negara yang menentukan kemampuan negara tersebut dalam menghadapi perubahan sebuah era.
2. Dalam mengembangkan Pusdiklat Bela Negara Warga Negara, maka diperlukan pengembangan organisasi hingga ke tingkat daerah dengan

didukung oleh Pemerintah, atau Kementerian Pertahanan secara khususnya. Kerjasama dengan banyak sektor kementerian lain, BUMN, BUMS dan Pemda dalam hal Infrastruktur (sarana dan prasarana) di daerah sangat mungkin untuk dilakukan. Dalam menjaga pertahanan negara, pengembangan ini sangat diperlukan terutama pada daerah perbatasan atau rawan konflik. Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mendorong kerjasama ini, hingga suatu saat menjadi sebuah agenda pertahanan negara yang akan mereka rasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

5.2 Rekomendasi

Paparan hasil penelitian yang disajikan pada Bab 4 menunjukkan keadaan Pusdiklat secara umum dari segi fasilitas dan kapasitas peserta didik kader Bela Negara guna memperkuat pertahanan negara Indonesia. Berikut beberapa saran berdasarkan hasil penelitian tersebut.

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

Penelitian yang dilakukan guna Mengembangkan Pusdiklat Bela Negara Rumpin dalam mewujudkan usaha Bela Negara ini, tidak lepas dari keterbatasannya. Hal ini dapat menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih dalam melihat apa saja yang dapat dikembangkan oleh Pusdiklat Bela Negara untuk dapat meningkatkan perannya dalam pertahanan negara. Sekaligus melihat efektifitas hasil pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Bela Negara melalui proses evaluasi yang belum berjalan secara maksimal.

Proses Evaluasi tersebut membutuhkan standar atau proses evaluasi yang baku guna melihat perkembangan karakter mereka. Proses Evaluasi yang diperlukan adalah sebuah proses penilaian yang memiliki standar

khusus, yang dapat merubah data-data kualitatif dilapangan menjadi data kuantitatif agar data-data tersebut dapat lebih mudah untuk dianalisa.

Peneliti juga melihat pentingnya sebuah penelitian terkait pelaksanaan Kantor Perwakilan Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemenhan) di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberadaan Kanwil Kemenhan sebagai induk bagi Pusdiklat Bela Negara yang menempatkan personilnya dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara. Penelitian tersebut harus memperlihatkan analisa terkait fungsi Kanwil Kemenhan yang dapat meningkatkan fungsi serta peran pertahanan didaerah.

Kemudian bagaimana teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat lebih mendalam mendukung eksistensi Pusdiklat Bela Negara sebagai investasi dari peningkatan karakter para kader Bela Negara di berbagai sektor.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

5.2.2.1 Pentingnya Melakukan Evaluasi Pendidikan Bela Negara

Menimbang dari hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam Bab 4, mengenai pentingnya peran Pusdiklat Bela Negara dalam mendukung UU PSDN mewujudkan Pertahanan Negara. Maka keberadaan Pusdiklat Bela Negara sangat diperlukan dalam membina Sumber Daya Manusia sebagai bibit nasionalisme dan patriotisme. Peran Pusdiklat Bela Negara dalam membangun kader Bela Negara merupakan investasi jangka panjang Pertahanan Negara harus dibuktikan dengan menunjukkan sebuah konfirmasi bahwa terdapat dampak yang signifikan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem evaluasi yang komprehensif dan terstandar bagi:

1. Peserta Kader Bela Negara
2. Pelatih, Pendidik dan Bahan ajar Pusdiklat Bela Negara
3. Aulumni peserta Diklat Bela Negara

Evaluasi yang diberikan merupakan penilaian kualitatif yang kemudian dikonversikan menjadi kuantitatif untuk dapat lebih mudah dan akurat dianalisa

oleh para pemegang keputusan. Disertakan juga kesulitan apa saja yang dialami oleh para penilai agar proses evaluasi tersebut juga dapat diperbaiki. Pemerintah memerlukan bukti bahwa pengembangan Karakter Bela Negara yang dilaksanakan Pusdiklat Bela Negara memiliki metode yang lebih efektif dibandingkan diklat Bela Negara yang diselenggarakan institusi lain.

5.2.2.2 Pengembangan Kaderisasi Bela Negara

Pengembangan pembangunan Karakter Bela Negara disetiap daerah, sama dengan membentuk garis pertahanan negara dalam menghadapi ancaman IPOLEKSOSBUDKUMTEKHANKAM. Pusdiklat dapat menjadi salah satu benteng pertahanan di daerah, terutama di daerah. Dengan terbentuknya jiwa nasionalisme yang tepat dan terarah, maka pertahanan dan keamanan negara akan semakin kuat dalam menjaga kedaulatannya. Keberadaan Perwakilan Pusdiklat Bela Negara di daerah melalui Kantor Perwakilan Pertahanan adalah salah satu cara agar hal tersebut dapat tercapai. Perwakilan Pusdiklat Bela Negara diharapkan nantinya berada di bawah Kanwil sebagai Induk Organisasi dan dikoordinasikan oleh Bidang Pothan di daerah. Keberadaan Pusdiklat akan membantu Kanwil dalam memaksimalkan fungsi pertahanannya di daerah.

Sedangkan dari segi Peningkatan kapasitas kaderisasi pelatihan Pusdiklat Bela Negara di pusat ataupun di daerah melalui Kanwil Kemhan tentu harus diiring dengan peningkatan jumlah calon-calon Kader Bela Negara yang dapat di didik. Untuk itu, Pemerintah dapat melakukan dua hal:

- Membuat nota kerja sama dengan setiap lembaga kementerian untuk mendidik dan melatih para pegawainya secara rutin kepada Pusdiklat Bela Negara atau kepada Perwakilan Pusdiklat di daerah yang sudah menggunakan kurikulum dan standar pendidikan dan pelatihan Bela Negara. Kementerian yang akan menjadi prioritas

kerjasama ini adalah Kementerian Pendidikan, terutama guru-guru (prioritas) dan murid-muridnya.

- Dikarenakan jumlah peserta pelatihan kader Bela Negara sebagian besar adalah dari sektor non-pemerintah (perusahaan), maka;
 - Pusdiklat dapat bekerja sama dengan BUMN atau BUMS agar mereka mengirimkan karyawannya untuk dididik dan dilatih Bela Negara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Peraturan OJK, yaitu Peraturan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan POJK No 11 tahun 2020 Tentang Paket Relaksasi Stimulus Covid-19 untuk Bank Umum dan Bank Syariah. Hal ini memungkinkan perusahaan yang memiliki cabang di daerah bisa mendapatkan pelatihan Bela Negara bagi karyawannya melalui perwakilan Pusdiklat Bela Negara yang berada di bawah Kanwil Kemenhan Bidang Pothan. Untuk lingkungan pemukiman dan kaum disabilitas, Kementerian Pertahanan dapat masuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan Pusdiklat menyertakan partisipasi masyarakat dalam usaha pendidikan dan pelatihan Bela Negara dibawah Kemenhan, maka masyarakat tidak akan khawatir dengan adanya wajib militer.